

## Siaran Pers Komnas Perempuan

# **Komnas Perempuan Menghimbau Bangsa dan Negara untuk Mendukung Perempuan Pembela HAM dan Perjuangannya**

Jakarta, 29 November 2009

Satu dekade reformasi telah dilalui bangsa Indonesia. Selama masa itu, perempuan tidak henti menunjukkan kapasitasnya dalam memimpin proses demokratisasi di Indonesia. Pengungkapan kasus perkosaan dalam Tragedi Mei 1998 telah memacu sejumlah banyak perempuan untuk mengorganisir diri demi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ada pula organisasi yang memfokuskan diri pada pemberian layanan pendampingan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan mencatat bahwa saat ini di seluruh Indonesia terdapat lebih 50 lembaga pemberi layanan yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. Dorongan dari gerakan perempuan menghasilkan 129 unit penanganan khusus bagi perempuan di kepolisian, 36 unit layanan terpadu yang berpusat di rumah sakit dan 23 Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 19 Provinsi yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Juga ada 30 kebijakan baru untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, yaitu 12 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan daerah dan satu kebijakan regional ASEAN.

Pencapaian paling utama yang diperoleh dari kerja keras perempuan pembela HAM adalah keberhasilan memecah kebisuhan tentang kekerasan terhadap perempuan. Lewat pendampingan kasus, upaya pendokumentasian dan pelaporan, para perempuan pembela HAM berhasil membangun ruang aman bagi sejumlah perempuan korban untuk mengungkap kekerasan yang mereka alami. Ruang aman ini adalah sesuatu yang istimewa dan masih langka mengingat sistem yang efektif dalam memberikan jaminan perlindungan bagi korban masih belum tersedia sementara budaya menyangkal dan menyalahkan korban justru terus tumbuh subur di dalam masyarakat. Keberadaan ruang aman merupakan bukti kepemimpinan perempuan dalam membuka dan merawat ruang demokrasi, dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk bersuara dan suaranya didengarkan. Memecah kebisuhan juga merupakan pencapaian penting mengingat begitu lamanya bangsa Indonesia hidup dalam pembungkaman dan pembekuan nalar akibat kuasa pemerintahan Orde Baru yang otoriter.

Di awal kurun dekade kedua reformasi, perempuan pembela HAM berada dalam kondisi prima untuk melanjutkan perjuangan. Lewat penuturan korban selama ini, pembela HAM dapat mengenali, dan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat, tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, akar masalah dan juga konsekuensinya. Hal ini penting tidak hanya bagi pemulihan diri perempuan korban tetapi juga bagi pemulihan komunitas dan bangsa. Pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kekerasan terhadap perempuan membantu kita untuk menimbang ulang bangunan negara bangsa Indonesia pasca Orde Baru yang ternyata justru menyuburkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan kemampuan ini, gerakan perempuan berada di tengah-tengah kekuatan demokrasi yang bertujuan membangun Indonesia yang bebas dari kekerasan dan ketidakadilan.

Bertepatan dengan Hari Internasional bagi Perempuan Pembela HAM, yang diperingati pada tanggal 29 November, Komnas Perempuan mengajak setiap elemen masyarakat untuk merayakan keberhasilan aktivisme perempuan dalam memecah kebisuhan. Pada perayaan ini berkumpul puluhan perempuan penyintas dari berbagai situasi konflik di Indonesia dan lebih seratus perempuan pembela HAM. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, lintas generasi dan bahkan lintas batas negara. Masing-masing dari mereka telah mengambil sikap untuk memastikan terciptanya dunia yang damai dan berkeadilan bagi semua, tanpa terkecuali. Komnas Perempuan mengajak seluruh bangsa dan negara untuk memberikan dukungan bagi para perempuan pembela HAM dan perjuangannya.